



PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KUTA SELATAN



KONSULTASI PUBLIK I

Jimbaran, 28 SEPTEMBER 2026

Materi dan Hasil Konsultasi Publik I



Outline Presentasi:

1

Pendahuluan



- Latar belakang pelaksanaan KLHS
- Maksud dan tujuan pelaksanaan KLHS
- Dasar hukum

2

Tahapan, Metode dan Teknik Penyusunan KLHS



- Tahapan dan Langkah Penyusunan KLHS
- Metode dan Teknik Pengumpulan Data dan Referensi Terkait
- Identifikasi Batas Wilayah Perencanaan dan Batas Wilayah Fungsional

3

Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan



- Tahapan Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan
- Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Pemangku Kepentingan (Konsultasi Publik 1)

4

Penutup



Hasil yang Diharapkan dari KP 1:

1



Kesepahaman pemangku kepentingan tentang maksud, tujuan, proses, dan kegunaan KLHS sebagai bagian dari penyusunan Raperbup RDTR

2



Dukungan data/informasi dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan penyusunan KLHS

3



Masukan dan saran bagi pembuatan dan pelaksanaan KLHS

4



Terjaringnya isu-isu pembangunan berkelanjutan dalam penataan ruang di Kecamatan Kuta Selatan dan sekitarnya

Pendahuluan & Latar Belakang



01



Konteks RDTR WP Kuta Selatan 2026–2046

Sesuai dengan amanat UU Penataan Ruang, PP Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Perda RTRW Kabupaten Badung 2025–2045, Pemerintah Kabupaten Badung menyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) dalam bentuk **Ranperbup tentang RDTR WP Kuta Selatan Tahun 2026–2046**.



UU
Penataan
Ruang

+



PP
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

+



Perda RTRW
Kabupaten Badung
2025–2045

**Ranperbup tentang
RDTR WP Kuta Selatan
Tahun 2026–2046**

02



Fungsi RDTR

Setelah ditetapkan, RDTR merupakan instrumen perencanaan tata ruang yang memberikan **kepastian pemanfaatan ruang secara rinci** dan menjadi **dasar** dalam proses **penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)**, khususnya melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*.

RDTR yang rinci dan terintegrasi dapat membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan perizinan yang lebih terukur, sekaligus mengarahkan investasi agar sesuai dengan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah.



RDTR

Kepastian
pemanfaatan
ruang secara rinci



KKPR / OSS

Dasar penerbitan
kegiatan
pemanfaatan ruang



Arah Investasi

Sesuai rencana
pembangunan dan
tata ruang wilayah

03



Urgensi KLHS dalam penyusunan RDTR

Amanat UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan penyusunan RDTR disertai dengan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**.

Sebelum proses penetapannya, Ranperbup RDTR harus telah diintegrasikan dengan rekomendasi KLHS dan tervalidasi.

KLHS merupakan upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam Ranperbup tentang RDTR WP Kuta Selatan sejak pada awal penyusunannya.



KLHS memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dipertimbangkan sejak awal penyusunan RDTR.

Maksud dan Tujuan



Maksud

KLHS RDTR WP Kuta Selatan dimaksudkan untuk melakukan analisis secara sistematis guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR WP Kuta Selatan.



Tujuan

1



Mengkaji pengaruh materi muatan RDTR WP Kuta Selatan terhadap kondisi lingkungan hidup.

2



Merumuskan alternatif penyempurnaan materi muatan RDTR WP Kuta Selatan untuk menentukan alternatif terbaik dalam rangka mengatasi isu pembangunan berkelanjutan.

3



Menyusun rekomendasi perbaikan materi muatan RDTR WP Kuta Selatan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4



Mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR WP Kuta Selatan.



Dasar Hukum



Undang-Undang / Peraturan Pemerintah (UU/PP)

- 1 **UU No. 24 Tahun 2007**
tentang Penanggulangan Bencana.
- 2 **UU No. 26 Tahun 2007**
tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 3 **UU No. 32 Tahun 2009**
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 4 **UU No. 23 Tahun 2014**
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 5 **UU No. 17 Tahun 2019**
tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 6 **UU No. 72 Tahun 2024**
tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali.
- 7 **PP No. 21 Tahun 2021**
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 8 **PP No. 22 Tahun 2021**
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 9 **PP No. 46 Tahun 2016**
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



Peraturan Menteri (PERMEN)

- 1 **PERMEN-KP No. 31 Tahun 2020**
tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- 2 **PERMEN Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN No. 10 Tahun 2021**
tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
- 3 **PERMEN Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN No. 5 Tahun 2022**
tentang Tata Cara Pengintegrasian KLHS dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.
- 4 **PERMEN-LHK No. 13 Tahun 2024**
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.



Peraturan Daerah (PERDA)

- 1 **PERDA Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020**
tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.
- 2 **PERDA Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023**
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043.
- 3 **PERDA Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023**
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- 4 **PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026**
tentang Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal.
- 5 **PERDA Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026**
tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine.
- 6 **PERDA Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2024**
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025–2045.
- 7 **PERDA Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2025**
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2025–2045.

Metode dan Teknik Penyusunan KLHS

Tahapan dan Langkah Penyusunan KLHS

1

Persiapan



- Pembentukan kelompok kerja
- Rapat pembahasan cakupan pekerjaan dan keanggotaan POKJA
- Rapat penyusunan dan penetapan surat keputusan POKJA KLHS
- Penyusunan kerangka acuan kerja KLHS
- Pengumpulan data dan referensi terkait

2

Pengkajian Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup



- Identifikasi wilayah perencanaan dan wilayah fungsional
- Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan
- Identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup
- Analisis pengaruh materi muatan KRP yang teridentifikasi berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup

3

Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP



- Perumusan alternatif-alternatif penyempurnaan KRP
- Penentuan alternatif terbaik KRP dari aspek pembangunan berkelanjutan
- Penyusunan hasil akhir perumusan alternatif penyempurnaan KRP

4

Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan KRP yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan



5



Pengintegrasian Hasil KLHS ke dalam KRP

6



Penjaminan Kualitas KLHS

7



Pendokumentasian KLHS

Penjelasan Tahapan KLHS



1 Persiapan



- a. **Pembentukan kelompok kerja:**
 - Rapat pembahasan cakupan pekerjaan dan keanggotaan POKJA
 - Rapat penyusunan surat keputusan POKJA KLHS
 - Penetapan surat keputusan POKJA
- b. **Penyusunan kerangka acuan kerja KLHS**
- c. **Pengumpulan data dan referensi terkait**



Terpenuhinya persyaratan dan standar kompetensi pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

2 Pengkajian Pengaruh KRP Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup



- a. **Identifikasi wilayah perencanaan** dan wilayah fungsional.
- b. **Identifikasi dan perumusan** isu pembangunan berkelanjutan.
- c. **Identifikasi materi muatan KRP** yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup.
- d. **Analisis pengaruh** materi muatan KRP yang teridentifikasi berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup.



Hasilnya:

- **Batas wilayah perencanaan** dan wilayah fungsional.
- **Disepakatinya rumusan isu pembangunan berkelanjutan** paling strategis.
- **Teridentifikasi materi muatan RDTR** yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup.
- **Hasil kajian pengaruh muatan RDTR** terhadap 6 aspek muatan wajib KLHS.

Lanjutan Tahapan KLHS



3



Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP

- Perumusan alternatif-alternatif penyempurnaan KRP.
- Penentuan alternatif terbaik KRP dari aspek pembangunan berkelanjutan.
- Penyusunan hasil akhir perumusan alternatif penyempurnaan KRP.



Rumusan alternatif penyempurnaan/perbaikan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, dan/atau Peraturan Zonasi yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4



Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan KRP yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan



Rekomendasi penyempurnaan/perbaikan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, dan/atau Ketentuan/Peraturan Zonasi yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

5



Pengintegrasian Hasil KLHS ke dalam KRP



Rancangan Peraturan Bupati yang telah diperbaiki/disempurnakan berdasarkan integrasi rekomendasi KLHS.

6



Penjaminan Kualitas KLHS



Laporan Penjaminan Kualitas KLHS: bahwa KLHS telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan, metode dan teknik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

7



Pendokumentasian KLHS



Laporan Dokumentasi KLHS: menggambarkan proses dan bukti pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data dan Referensi Terkait

Identifikasi Kebutuhan Data dan Pemangku Kepentingan Pengampu Data.

No	 Jenis Data	 Pengampu Data
1	 Peta dasar (garis pantai, batas-batas administrasi)	Badan Informasi Geospasial
2	 Peta-peta tematik karakteristik wilayah:	
	2.1 Peta topografi	Badan Informasi Geospasial
	2.2 Peta kelas lereng	Badan Informasi Geospasial
	2.3 Peta geologi	Badan Geologi
	2.4 Peta jenis tanah	Balai Penelitian Tanah
	2.5 Peta hidrologi	Badan Geologi
	2.6 Peta ekoregion	Kementerian Lingkungan Hidup/Kementerian Kehutanan
	2.7 Peta karakteristik bentang alam	Kementerian Lingkungan Hidup/Kementerian Kehutanan
	2.8 Peta karakteristik vegetasi alami	Kementerian Lingkungan Hidup/Kementerian Kehutanan
	2.9 Peta tutupan lahan	Kementerian Lingkungan Hidup/Kementerian Kehutanan
	2.10 Peta penggunaan lahan	Kementerian Lingkungan Hidup/Kementerian Kehutanan
	2.11 Peta kawasan hutan	Kementerian Kehutanan
	2.12 Peta jaringan transportasi	Dinas PUPR
	2.13 Peta jaringan air bersih	Dinas PUPR
	2.14 Peta jaringan telekomunikasi	Dinas Kominfo
	2.15 Peta risiko bencana	BNPB; BPBD
3	 Data meteorologi (curah hujan, suhu udara, kelembaban udara)	Pemodelan dari data Climate Hazard Center dan The NASA POWER
4	Data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil:	
	4.1 Batimetri	Badan Informasi Geospasial
	4.2 Ekosistem pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
	4.3 Pulau-pulau kecil	Badan Informasi Geospasial

Identifikasi Kebutuhan Data dan Pemangku Kepentingan Pengampu Data

No	Jenis Data	Pengampu Data
5 	Data statistik:	
	5.1 Kependudukan	BPS
	5.2 Perekonomian	BPS
6 	Muatan KLHS:	
	6.1 Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Analisis Tim Penyusun KLHS
	6.2 Jasa Ekosistem	Analisis Tim Penyusun KLHS
	6.3 Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; BPBD; BPS; Dinas Kesehatan
	6.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Dinas PUPR; Dinas Pertanian; BPS
	6.5 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	BNPB
	6.6 Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; BRIN; Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; KSDA Bali; Perguruan Tinggi
7 	Data sosial dan budaya	Dinas Kebudayaan; Dinas Sosial
8 	Data sosial ekonomi:	
	8.1 Pertanian, perkebunan dan peternakan	Dinas Pertanian
	8.2 Perikanan	Dinas Perikanan
	8.3 Pariwisata	Dinas Pariwisata
	8.4 Industri kecil dan kerajinan rumah tangga	Disperinaker
	8.5 Koperasi, UMKM dan perdagangan	Diskop, UKM & Perdagangan

Identifikasi Kebutuhan Data dan Pemangku Kepentingan Pengampu Data

No	Jenis Data	Pengampu Data
9 	Sarana dan Prasarana	
	9.1 Jalan	Dinas PUPR
	9.2 Pelabuhan	Dinas Perhubungan
	9.3 Telekomunikasi	Dinas Kominfo
	9.4 Listrik	PLN
	9.5 Air bersih	PDAM
	9.6 Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	9.7 Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
	9.8 Kesehatan	Dinas Kesehatan
	9.9 Sarana ekonomi	Diskop, UKM & Perdagangan
10 	Dokumen yang relevan dengan pembuatan dan pelaksanaan KLHS	
	10.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
	10.2 KLHS RTRW Kabupaten	Dinas PUPR
	10.3 KLHS dan Dokumen RPJPD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Bappeda
	10.4 KLHS dan Dokumen RPJMD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Bappeda

Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan



Tahapan Identifikasi dan Perumusan Isu PB



Kriteria Potensi Dampak



penduduk terdampak



luas dampak



intensitas dampak



komponen LH terdampak



sifat kumulatif



berbalik/tidak berbaliknya dampak



Isu Sementara Aspek Lingkungan Hidup Kecamatan Kuta Selatan



01 Tekanan kualitas pesisir dan laut



Aktivitas pariwisata, permukiman, dan kawasan jasa di pesisir berpotensi meningkatkan beban pencemaran, sampah pesisir, dan tekanan pada sempadan pantai.



Kuta Selatan merupakan kawasan pesisir dan pusat aktivitas wisata pantai.

02 Timbulan sampah dan layanan persampahan



Pertumbuhan permukiman, akomodasi, restoran, dan kunjungan wisata meningkatkan kebutuhan pengurangan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.



Sumber data: DLHK Badung; BPS Badung/Kuta Selatan.

03 Ketersediaan air dan efisiensi sumber daya



Kebutuhan air meningkat untuk penduduk, akomodasi, kegiatan ekonomi, dan fasilitas wisata; perlu pengendalian pemanfaatan air dan efisiensi.



Sumber data: PDAM/PUPR; BPS; dokumen RDTR.

04 Risiko bencana dan perubahan iklim pesisir



Abrasi, gelombang pasang, cuaca ekstrem, banjir lokal, dan potensi tsunami perlu diperhitungkan dalam pengaturan pola ruang dan zonasi.



Sumber data: InaRISK BNPB, BPBD Badung, BMKG.

Isu Sementara Aspek Tata Ruang Kecamatan Kuta Selatan

01

Tekanan alih fungsi dan intensitas pembangunan



Perkembangan akomodasi, jasa, perdagangan, dan permukiman mendorong kebutuhan pengendalian intensitas pemanfaatan ruang.



Perlu dikaji terhadap pola ruang
RDTR dan RTRW Badung 2025–2045.

02

Konflik pemanfaatan ruang



Potensi tumpang tindih kepentingan antara kawasan pariwisata, permukiman, pesisir, infrastruktur, ruang terbuka, dan kawasan sensitif.



Sumber: RDTR, RTRW, BIG, PUPR/Bappeda.

03

Perlindungan sempadan pantai dan ruang sensitif



Sempadan pantai, kawasan upacara adat, kawasan lindung, dan ekosistem pesisir perlu dikendalikan agar fungsi ekologis dan sosial tetap terjaga.



Rujukan: Perda Provinsi Bali tentang Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai.

04

Konektivitas, akses, dan beban lalu lintas



Pusat kegiatan wisata dan simpul aktivitas memerlukan jaringan jalan, parkir, dan akses yang mendukung keselamatan serta kenyamanan masyarakat.



Sumber: Dinas PUPR, Dishub, dokumen RDTR.

Isu Sementara Aspek Ekonomi Kecamatan Kuta Selatan



Ketergantungan ekonomi pada pariwisata

Kuta Selatan memiliki konsentrasi kegiatan akomodasi, restoran, jasa wisata, dan ekonomi pantai; ketergantungan ini perlu diimbangi diversifikasi dan ketahanan ekonomi lokal.



 **Sumber:** BPS Badung; Dinas Pariwisata; PDRB Badung.



Pemerataan manfaat ekonomi lokal

Pertumbuhan kawasan wisata perlu lebih terhubung dengan UMKM, tenaga kerja lokal, pasar desa, produk kreatif, dan rantai pasok lokal.



 **Sumber:** Diskop UKM & Perdagangan; BPS; desa/kelurahan.



Tekanan harga lahan dan ruang usaha

Intensitas investasi dan perkembangan properti dapat meningkatkan tekanan biaya lahan/sewa serta memengaruhi keberlanjutan usaha kecil dan ruang hidup lokal.



 **Perlu dikaji** melalui data pemanfaatan ruang, NJOP, dan izin usaha.



Infrastruktur penunjang ekonomi berkelanjutan

Kegiatan ekonomi memerlukan dukungan air, sanitasi, persampahan, drainase, energi, dan transportasi yang memadai agar tidak menurunkan kualitas lingkungan.



 **Sumber:** PUPR, DLHK, PDAM, PLN, Dishub.

Isu Sementara Aspek Sosial Budaya Kecamatan Kuta Selatan



Pertumbuhan penduduk dan pelayanan dasar

Dinamika penduduk, pekerja, dan wisatawan meningkatkan kebutuhan fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, persampahan, dan ruang publik.



BPS mencatat Kuta Selatan sebagai salah satu kecamatan penting di Kabupaten Badung.



Pelestarian ruang budaya dan adat

Pura, ruang upacara, kawasan pesisir bernilai budaya, dan ruang sosial masyarakat perlu dipertahankan dalam pengaturan ruang.



Sumber: Dinas Kebudayaan; desa adat; RDTR.



Perubahan sosial akibat urbanisasi dan pariwisata

Mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi intensif dapat mengubah pola sosial, kebutuhan hunian, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.



Sumber: BPS; Dinas Sosial; desa/kelurahan.



Keadilan akses dan kualitas hidup masyarakat lokal

Pembangunan perlu memastikan masyarakat lokal memperoleh akses yang adil terhadap layanan, ekonomi, ruang publik, pesisir, dan lingkungan yang sehat.



Rujukan: prinsip pembangunan berkelanjutan dalam KLHS.



Sumber rujukan: BPS Kecamatan Kuta Selatan Dalam Angka 2025; Kabupaten Badung Dalam Angka 2026; Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; dokumen RDTR.

Penjaringan Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Konsultasi Publik I



Metode: *Brainstorming*

Pemangku kepentingan menyampaikan masukan, koreksi, dan tambahan isu berdasarkan karakteristik wilayah, data, pengalaman lapangan, dan dampak yang dirasakan.



Fokus Masukan Peserta



Lingkungan Hidup

Apa tekanan lingkungan paling nyata?



Tata Ruang

Di mana konflik ruang dan zona sensitif?



Ekonomi

Kegiatan ekonomi apa yang perlu diarahkan?



Sosial Budaya

Ruang sosial/budaya apa yang perlu dijaga?



Tujuan KP I

1

Mengonfirmasi isu sementara



2

Menambah isu yang belum teridentifikasi



3

Menentukan isu yang perlu diperdalam dalam KLHS



Penutup

KLHS memastikan RDTR WP Kuta Selatan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan sejak tahap perencanaan.



Menghindari dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup



Menguatkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan ruang



Memastikan masukan pemangku kepentingan menjadi bagian penting proses KLHS



Menjadi dasar penyempurnaan materi muatan RDTR



Matur Suksma
Terima Kasih



Masukan KP I menjadi bahan perumusan isu pembangunan berkelanjutan KLHS RDTR WP Kuta Selatan.

LINK PENGISIAN FORM
PENJARINGAN ISU
KLHS RDTR KECAMATAN KUTA
SELATAN

<https://forms.gle/1jJw6QCJQUKpxAA9>

